

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 4 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------------|
| Media Online | Tribunnews.com |
| Media Cetak | |

Buka Peluang Bisnis, Pemprov DKI Jakarta Dorong PT JIEP dan PT MRT Jakarta Menjadi Perseroan Daerah

Penulis: Miftahul Munir | Editor: Dwi Rizki

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dan [PT MRT Jakarta](#) untuk bertransformasi menjadi Perseroan Daerah (Perseroda). Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) [Pemprov DKI Jakarta](#), Joko Agus Setyono, dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (7/11/2024). "Langkah ini diambil untuk mendukung transformasi kelembagaan, melalui peningkatan agilitas, pengembangan usaha, serta untuk menunjang potensi bisnis di masa depan," kata Joko. Joko menjelaskan bahwa [Pemprov DKI Jakarta](#) saat ini sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pendirian [PT JIEP](#) sebagai Perseroan Daerah. Menurutnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), status badan hukum [PT JIEP](#) perlu diubah menjadi Perseroan Daerah (Perseroda) untuk lebih memperkuat peranannya dalam pengembangan kawasan industri Pulogadung. "Sebagai BUMD, pendirian [PT JIEP](#) diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan kawasan industri Pulogadung, meningkatkan pendapatan pajak daerah, serta menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap nilai tanah di sekitar kawasan. Selain itu, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja," tuturnya. Joko juga menjelaskan bahwa Raperda tersebut mencakup rencana penyertaan modal daerah pada [PT JIEP](#), sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memiliki saham minimal 51 persen. Hal ini bertujuan untuk mengamankan aset lahan yang belum bersertifikat dan memperbaiki struktur permodalan [PT JIEP](#), guna mendukung ekspansi usaha di masa depan. "Oleh karena itu, kami berharap perubahan status hukum [PT JIEP](#) menjadi Perseroan Daerah, bersama dengan penambahan modal yang disampaikan melalui Raperda ini, dapat disetujui oleh Dewan yang terhormat," ungkap Joko. Selain itu, Joko juga menyampaikan bahwa Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang [PT MRT Jakarta](#) (Perseroda) sudah mulai dibahas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk mendorong perkembangan sistem transportasi publik yang dapat mendukung mobilitas warga serta aktivitas ekonomi kota. "Upaya ini juga bertujuan untuk mendukung transformasi Jakarta menjadi kota global. Salah satu langkah yang diambil adalah pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) sebagai infrastruktur transportasi publik yang terintegrasi dan berkelanjutan. [PT MRT Jakarta](#) sebagai operator perlu memperluas fungsi, tugas, kewenangan, serta cakupan wilayah operasionalnya, baik melalui ekspansi maupun optimalisasi kegiatan usaha, hingga ke luar wilayah DKI Jakarta," tambah Joko.